

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BOS DALAM PENINGKATAN FASILITAS DAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR SURABAYA

Keyza Zana Sabitha Zayyan¹, Rizma Aulia², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴
25040674267@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674273@mhs.unesa.ac.id²,
indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran di sekolah dasar di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku kebijakan publik, serta dokumen resmi terkait pengelolaan dana bos, khususnya pada SDN Made 1 Surabaya dan SDB Lidah Kulon 1/464 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, sedangkan SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya lebih efektif secara menyeluruh di dukung oleh pengelolaan yang sistematis, efisien, dan berbasis evaluasi kebijakan. Kendala utama yang ditemukan adalah keterlambatan pencairan dana serta perbedaan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem distribusi dana serta peningkatan kapasitas manajerial sekolah agar kebijakan dana bos dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

Kata Kunci: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Efektivitas Kebijakan, Kualitas Pembelajaran, Fasilitas Sekolah, Pengelolaan Dana BOS, Sekolah Dasar, Transparansi, Akuntabilitas, Evaluasi Kebijakan, Manajemen Sekolah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the School Operational Assistance (BOS) policy in improving facilities and the quality of learning in elementary schools in Surabaya. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method. Data sources were obtained from scientific journals, public policy books, and official documents related to the management of BOS funds, specifically at SDN Made 1 Surabaya and SDB Lidah Kulon 1/464 Surabaya. The results show effectiveness in terms of transparency and accountability, while SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya is more effective overall, supported by systematic, efficient, and policy-based evaluation management. The main obstacles found are delays in fund disbursement and differences in the quality of human resources in school financial management. Therefore, improvements in the fund distribution system and increased school managerial capacity are needed so that the BOS fund policy can run more optimally and sustainably

Keywords: School Operational Assistance (BOS), Policy Effectiveness, Learning Quality, School Facilities, BOS Fund Management, Elementary School, Transparency, Accountability, Policy Evaluation, School Manage.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak hanya di tentukan oleh kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga oleh ketersediaan sarana, prasarana, serta dukungan

pembiayaan yang memadai. Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan menjadi faktor krusial untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan dasar, diluncurkannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan, seperti pengadaan buku, alat tulis, perbaikan fasilitas, serta pendukung kegiatan pembelajaran lainnya. Melalui dana BOS, diharapkan sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik dengan biaya tambahan.

Di tingkat sekolah dasar, penggunaan dana BOS memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama pembiayaan operasional sekolah. Kota Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah sekolah dasar cukup banyak dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana BOS di sekolah dasar Surabaya ini menjadi aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Meskipun dana BOS telah berjalan selama bertahun-tahun, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya, seperti ketepatan sasaran penggunaan anggaran, transparansi dalam pengelolaan, serta dampaknya terhadap peningkatan fasilitas dan kualitas pembelajaran. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai, sejauh mana efektivitas dana BOS dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana BOS dalam meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran di sekolah dasar Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu Apa perbedaan implementasi dana BOS antara SDN Made 1 Surabaya dan SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya? Faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS di kedua sekolah tersebut? Bagaimana dampak penggunaan dana BOS terhadap fasilitas dan kualitas pembelajaran?. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan implementasi program serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kebijakan pendidikan ke depan.

Selain itu, dalam perspektif kebijakan publik efektivitas suatu program tidak hanya dilihat dari tercapainya tujuan secara umum, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut di implementasikan di lapangan. Perbedaan kondisi antar sekolah seperti kapasitas sumber daya manusia, manajemen sekolah, serta sistem pengelolaan uang, dapat memengaruhi tingkat keberhasilan penggunaan dana bos. Oleh karena itu, penting untuk melihat implementasi kebijakan ini secara lebih spesifik pada tingkat satuan pendidikan.

Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana dana bos telah digunakan secara efektif dalam meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses pelaksanaan kebijakan termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan dana. Dengan demikian, analisis efektivitas dana BOS perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan kebijakan tersebut, lebih lanjut, perbandingan antar sekolah juga menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap sekolah memiliki karakteristik dan strategi pengelolaan yang berbeda, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas yang berbeda pula. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tingkat efektivitas penggunaan dana BOS, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan di

masing-masing sekolah.

Tinjauan Pustaka

Teori Implementasi Kebijakan George Edward III

Dalam menganalisis efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan secara optimal atau tidak di lapangan.

Pertama, aspek komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada para pelaksana di tingkat bawah. Komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan transmisi (*transmission*). Dalam konteks pengelolaan dana BOS, komunikasi yang baik tercermin melalui adanya sosialisasi kebijakan yang jelas dari pemerintah kepada pihak sekolah, pemahaman yang memadai mengenai petunjuk teknis penggunaan dana, serta kejelasan dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penggunaan dana.

Kedua, sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tidak hanya terbatas pada ketersediaan dana, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan teknis dalam mengelola kebijakan. Dalam pengelolaan dana BOS, sumber daya manusia seperti kepala sekolah, bendahara, dan tim pengelola memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana digunakan secara tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi ARKAS dan SipLah juga menjadi bagian dari sumber daya yang mendukung efektivitas pengelolaan dana.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan mencakup komitmen, integritas, serta tingkat kesadaran pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sikap yang positif dari pelaksana, seperti adanya tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks dana BOS, disposisi yang baik tercermin dari upaya pihak sekolah dalam memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keempat, struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi, prosedur, serta mekanisme kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan terstruktur akan memudahkan koordinasi antar pihak serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan dana BOS, struktur birokrasi terlihat dari adanya prosedur perencanaan anggaran melalui RKAS, mekanisme pelaporan keuangan, serta sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Struktur yang terlalu rumit justru dapat menghambat implementasi kebijakan, sedangkan struktur yang sederhana dan efektif akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Selain keempat faktor tersebut, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, seperti kebijakan pemerintah daerah, sistem pencairan dana, serta dinamika kebutuhan di masing-masing sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kesiapan internal sekolah, tetapi juga pada

dukungan sistem yang lebih luas.

Di sisi lain, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya, penelitian ini juga menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui enam indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, baik dari sisi proses maupun hasil yang dicapai.

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks dana BOS, efektivitas dapat dilihat dari peningkatan fasilitas pendidikan serta kualitas pembelajaran di sekolah. Efisiensi menilai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan, sehingga penggunaan dana harus dilakukan secara hemat namun tetap menghasilkan dampak yang optimal. Kecukupan menunjukkan apakah kebijakan mampu memenuhi kebutuhan yang ada, terutama kebutuhan dasar sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Selanjutnya, pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan secara adil kepada seluruh sasaran, dalam hal ini seluruh siswa tanpa adanya diskriminasi. Responsivitas mengacu pada kemampuan pihak pelaksana dalam merespons kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di lingkungan sekolah. Sedangkan ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk ketepatan waktu dalam penggunaan dana.

Keenam indikator tersebut menjadi alat analisis yang penting dalam mengevaluasi implementasi dana BOS, karena mampu menggambarkan sejauh mana kebijakan tidak hanya dijalankan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan di masing-masing sekolah.

Dengan demikian, teori implementasi kebijakan George Edward III dan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn digunakan secara komplementer sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Teori Edward III membantu menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan, sedangkan teori Dunn digunakan untuk menilai hasil dan tingkat keberhasilan kebijakan. Kombinasi kedua teori ini memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh dalam memahami efektivitas penggunaan dana BOS di sekolah dasar.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dengan mengevaluasi beragam sumber tertulis yang berkaitan dengan subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menilai seberapa efektif dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dimanfaatkan berdasarkan berbagai hasil studi dan laporan yang telah dihasilkan sebelumnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai referensi, seperti laporan resmi terkait pemerintah, peraturan mengenai dana BOS, serta publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, buku, artikel akademik. Tahapan analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mengidentifikasi, menginvestigasi, dan membandingkan beragam informasi yang diperoleh dari sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai sumber yang telah di kumpulkan, kemudian di analisis menggunakan teori

evaaluasi kebijakan dari William Dunn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dasar Surabaya menunjukkan adanya perbedaan tingkat efektivitas antar sekolah, khususnya antara SDN Made 1 Surabaya dan SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek teknis maupun manajerial dalam pengelolaan dana.

Pada SDN Made 1 Surabaya, permasalahan utama dalam implementasi dana BOS terletak pada keterlambatan pencairan dana yang berdampak langsung terhadap operasional sekolah. Keterlambatan ini menyebabkan beberapa kegiatan sekolah, seperti pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan pembayaran tenaga honorer tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif pengelolaan dana sudah dilakukan dengan baik, namun faktor eksternal seperti sistem pencairan dana dari pemerintah masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Sementara itu, pada SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya, permasalahan yang muncul cenderung lebih berkaitan dengan aspek evaluasi kebijakan. Namun, secara umum kondisi pengelolaan dana BOS di sekolah ini relatif lebih stabil. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pengelolaan yang lebih terstruktur serta kemampuan pihak sekolah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan yang ada. Dengan demikian, kendala yang dihadapi tidak terlalu berdampak signifikan terhadap operasional sekolah.

Dari sisi pemanfaatan dana, kedua sekolah sama-sama menggunakan dana BOS untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, perbaikan fasilitas sekolah, serta pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Namun, tingkat optimalisasi penggunaan dana menunjukkan perbedaan. Pada SDN Lidah Kulon, pemanfaatan dana cenderung lebih terencana dan efisien sehingga mampu memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap peningkatan fasilitas sekolah.

Selain peningkatan fasilitas, dana BOS juga berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada kedua sekolah, dana BOS digunakan untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, menunjang kebutuhan guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi siswa. Akan tetapi, efektivitas pemanfaatan dana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran terlihat lebih menonjol pada SDN Lidah Kulon, karena didukung oleh pengelolaan yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan.

Jika di analisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, maka dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas kebijakan dana BOS di kedua sekolah menunjukkan perbedaan. Dari aspek efektivitas, SDN Lidah Kulon lebih mampu mencapai tujuan peningkatan fasilitas dan kualitas pembelajaran secara optimal. Dari aspek efisiensi, penggunaan dana di SDN Lidah Kulon juga lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Sementara itu, dari aspek kecukupan, kedua sekolah pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun SDN Lidah Kulon menunjukkan tingkat pemenuhan yang lebih maksimal.

Dalam hal pemerataan, SDN Lidah Kulon juga dinilai lebih baik karena manfaat dana BOS dapat dirasakan secara merata oleh seluruh siswa. Responsivitas sekolah terhadap kebutuhan juga lebih tinggi, karena adanya kemampuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan kondisi yang dihadapi. Sedangkan dari aspek ketepatan, SDN Made masih

menghadapi kendala akibat keterlambatan pencairan dana yang memengaruhi kesesuaian penggunaan dana dengan waktu yang di butuhkan.

Tabel 1 Perbandingan Efektivitas Dana Bos Berdasarkan Indikator William N. Dunn

Indikator	SDN Made 1 Surabaya	SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya
Efektivitas	Belum optimal karena keterlambatan pencairan dana	Optimal, tujuan tercapai dan tidak ada pungutan biaya
Efisiensi	Cukup efisien	Sangat efisien (mengacu SSH dan RKAS)
Kecukupan	Memenuhi kebutuhan dasar	Memenuhi seluruh kebutuhan sekolah
Pemerataan	Belum maksimal	Merata untuk seluruh siswa
Responsivitas	terbatas	Tinggi (revisi RKAS dan sosialisasi)
Ketepatan	Terkendala waktu pencairan	Tepat (di dukung ARKAS dan SipLah)

Selain faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, terdapat aspek lain yang turut memengaruhi efektivitas implementasi dana BOS seperti, perbedaan efektivitas implementasi dana BOS pada kedua sekolah juga dapat ditinjau dari aspek koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, keberhasilan pengelolaan dana tidak hanya bergantung pada pihak internal sekolah, tetapi juga melibatkan peran dinas pendidikan, pemerintah daerah, serta sistem birokrasi yang mengatur mekanisme penyaluran dana. Pada SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya, koordinasi yang terjalin cenderung lebih efektif sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dapat berjalan secara berkesinambungan. Sebaliknya, pada SDN Made 1 Surabaya, hambatan dalam proses pencairan dana menunjukkan adanya celah dalam koordinasi eksternal yang berdampak pada keterlambatan implementasi program sekolah.

Tabel 2 Dampak Penggunaan Dana Bos Terhadap Fasilitas Dan Pembelajaran

Aspek	Sdn made 1 surabaya	Sdn lidah kulon 1/464 surabaya
Fasilitas	Meningkat, namun terlambat	Meningkat secara signifikan
Kegiatan siswa	Sebagian terhambat	Berjalan optimal
Biaya Pendidikan	Masih terdampak	Gratis (tanpa pungutan)
Suistem pengelolaan	Cukup baik	Sangat sistematis dan terstruktur

Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif manajemen publik, pengelolaan dana BOS juga mencerminkan kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya secara optimal. SDN Lidah Kulon menunjukkan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, ditandai dengan

adanya perencanaan yang matang, penganggaran berbasis kebutuhan, serta pemanfaatan teknologi seperti ARKAS dan SipLah secara maksimal. Hal ini memungkinkan sekolah untuk melakukan pengendalian anggaran secara lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Sementara itu, meskipun SDN Made telah menunjukkan upaya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan dalam aspek teknis masih menjadi kendala dalam mencapai efektivitas yang optimal.

Dari sudut pandang keberlanjutan kebijakan (policy sustainability), implementasi dana BOS di SDN Lidah Kulon juga memiliki potensi yang lebih baik dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan serta kemampuan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Dengan kata lain, sekolah tidak hanya berfokus pada penggunaan dana dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, pada SDN Made, fokus pengelolaan masih cenderung bersifat reaktif terhadap kondisi yang ada, sehingga keberlanjutan program belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, aspek partisipasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Pada SDN Lidah Kulon, keterlibatan berbagai pihak seperti guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini berdampak pada meningkatnya rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program yang dijalankan, sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih efektif. Di sisi lain, pada SDN Made, partisipasi masih relatif terbatas sehingga pengambilan keputusan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan seluruh pihak yang terlibat.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh konteks implementasinya. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi elemen penting yang memengaruhi hasil akhir kebijakan. Dalam hal ini, SDN Lidah Kulon mampu mengoptimalkan keempat faktor tersebut, sedangkan SDN Made masih menghadapi kendala terutama pada aspek sumber daya eksternal dan sistem birokrasi.

Implikasi dari perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran dana BOS, khususnya dalam hal ketepatan waktu pencairan dana. Keterlambatan pencairan dapat menghambat efektivitas kebijakan, meskipun pengelolaan internal sekolah sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan sekolah di lapangan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang krusial. Pelatihan terkait pengelolaan keuangan sekolah, pemanfaatan teknologi, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja perlu terus ditingkatkan agar seluruh sekolah memiliki kemampuan yang merata dalam mengelola dana BOS. Dengan demikian, kesenjangan efektivitas antar sekolah dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam memperbaiki fasilitas serta meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar di Surabaya menunjukkan adanya

variasi pada masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal sekolah, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung pihak sekolah.

SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan SDN Made 1 Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan dana yang lebih terstruktur, efisien, serta berbasis pada kebutuhan riil sekolah. Selain itu, pemanfaatan dana BOS di SDN Lidah Kulon mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan maupun kualitas proses pembelajaran. Ketersediaan sarana yang memadai serta kegiatan pembelajaran yang berjalan optimal menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan di sekolah tersebut.

Di sisi lain, SDN Made 1 Surabaya memiliki keunggulan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Namun demikian, tingkat efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat hambatan eksternal, khususnya terkait keterlambatan pencairan dana BOS. Kondisi ini berdampak pada terganggunya pelaksanaan program sekolah, seperti keterlambatan pemenuhan kebutuhan pembelajaran dan operasional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tata kelola internal sudah cukup baik, faktor eksternal tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Jika ditinjau berdasarkan indikator evaluasi kebijakan, SDN Lidah Kulon lebih unggul dalam aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keunggulan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang diterima, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pengelolaan keuangan yang sistematis, serta kemampuan manajerial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan dana secara tepat sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana BOS sangat dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, sistem manajemen keuangan, serta perencanaan yang berbasis kebutuhan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal mekanisme dan ketepatan waktu pencairan dana. Kedua faktor ini harus berjalan secara selaras agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dana BOS memerlukan adanya pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan. Sekolah yang mampu menyesuaikan penggunaan dana dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang cenderung memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan kinerja kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan temuan studi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap sistem pencairan dana BOS agar lebih tepat waktu, transparan, dan tidak menghambat operasional sekolah. Optimalisasi sistem digital serta penyederhanaan birokrasi dapat menjadi solusi untuk meminimalisir keterlambatan pencairan dana.

Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan administrasi. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pemanfaatan

teknologi seperti ARKAS dan SipLah perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan dana menjadi lebih profesional dan akuntabel.

Sekolah perlu memperkuat sistem perencanaan dan evaluasi penggunaan dana dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan prioritas program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS harus terus ditingkatkan melalui keterlibatan berbagai pihak, seperti komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Partisipasi ini penting untuk menciptakan pengawasan yang efektif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Praktik baik (best practices) yang telah diterapkan oleh sekolah dengan tingkat efektivitas tinggi, seperti SDN Lidah Kulon 1/464 Surabaya, dapat dijadikan sebagai model atau acuan bagi sekolah lain dalam mengelola dana BOS secara lebih efisien dan berkelanjutan. Transfer pengetahuan dan pengalaman antar sekolah dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana secara merata.

Dengan adanya implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan dana BOS di sekolah dasar dapat menjadi lebih optimal, merata, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021. *RISMA: Jurnal Riset Manajemen*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>
- Azizah, L. L. (2023). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Teori William Dunn (Studi Kasus pada SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.21009/jmp.v14i2.35797>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
https://drive.google.com/file/d/1Ds_mXRSXIwscpOf_m8R5_X_vJKzFLso0/view?usp=driveview
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press. <https://doi.org/10.2307/1956684>
- Mulya, M. H. W., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya. *Jurnal Publika*, 9(3), 181–194. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p181-194>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. <https://share.google/UhpBMmAEJEuHzF7o9>
- Rachmawati, U. (2024). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Made 1 Surabaya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i02.442>
- Setiawan, H., & Miharja, M. (2023). Analysis of BOS Fund Usage at SMA Muhammadiyah 4 Jakarta in Relation to the Minister of Education and Culture Regulation Number 63 of 2023 on Technical Guidelines for the Management of Educational Unit Operational Assistance Funds. *Jurnal Hukum, Manajemen, dan Regulasi*. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.58>
- Susanti, P., & Nafi'ah, B. A. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.21009/jpd.v13i2.34167>
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka

Cipta. <https://share.google/4FwhTsQaD5I4AC3SJ>
Ulukyanan, S., Kambuaya, M. K. P., & Sesa, P. V. S. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SD Negeri Emereuw Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 19(1). <https://doi.org/10.52062/jaked.v19i1.3823>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://share.google/BuGC5G8Ig9CjMFhRY>